



DOLI TUA MULIA RAJA PANJAITAN, S.AP, M.IP
PIKI DARMA KRISTIAN PARDEDE, S.Sos., M.Si.

ADMINISTRASI PUBLIK





Biografi Penulis



DOLI TUA MULIA RAJA PANJAITAN, S.AP, M.IP

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, S.AP, M.IP lahir di Kisaran pada tanggal 8 Februari 1988. Aktif sebagai Dosen Tetap Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darma Agung. Penulis menyelesaikan Pendidikan S-1 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung pada tahun 2010, menyelesaikan Pendidikan S-2 Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Darma Agung (UDA) Medan pada tahun 2017. Mengampu Mata Kuliah Administrasi Publik, Manajemen Administrasi Publik, Teori-Teori Demokrasi dan Teori Birokrasi. Penulis aktif dalam mengajar dan menulis artikel di beberapa Jurnal Ilmiah seperti Kohesi Science (2018), Darma Agung (2019), Governance Opinion (2019), Prointegrita (2020), Talenta (2020).



PIKI DARMA KRISTIAN PARDEBE, S.Sos. M.Si

Piki Darma Kristian Pardebe lahir di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada 16 Desember 1994. Gelar kesarjanaannya (S1) diperoleh dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada tahun 2017, kemudian meraih gelar Magister (S2) Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2019. Aktif sebagai Dosen dan Peneliti dibidang kajian Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik hingga menerbitkan beberapa jurnal nasional dan internasional. Selain itu merupakan pendiri dari Centre for Public Policy and Local Governance Studies (PUBLIGO Centre), dan ia fokus pada isu-isu Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan, Pengarusutamaan Gender, Politik, Lingkungan, dan HAM. Penulis juga aktif menjadi peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (ELSAKA) Sumut.



Penerbit:
CV. EUREKA MEDIA AKSARA
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-5896-10-6



9 786235 896106

ADMINISTRASI PUBLIK

Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, S.AP, M.IP
Piki Darma Kristian Pardede, S.Sos. M.Si



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

ADMINISTRASI PUBLIK

Penulis : **Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, S.AP, M.IP**
Piki Darma Kristian Pardede, S.Sos. M.Si

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Fachri Ulil Albab

ISBN : 978-623-5896-10-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2021**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun Buku Administrasi Publik ini dengan baik. Dalam Buku ini kami membahas mengenai Pengertian Ilmu Administrasi Publik. Dalam Buku ini dibahas hal-hal yang merupakan Pengantar Ilmu Administrasi, diantaranya adalah pengertian administrasi, perkembangan administrasi, unsur-unsur administrasi, serta paradigma administrasi sampai tuntutan masa kini terhadap pentingnya Administrasi Publik. Dan dengan Buku ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang mendalam sebagai pemula di bidang Ilmu Administrasi Publik.

Buku ini dibuat dengan berbagai pengetahuan dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan masalah selama mengerjakan Buku ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Buku ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada Buku ini. Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Buku selanjutnya. Akhir kata semoga Buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.

Medan, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 ADMINISTRASI PUBLIK.....	1
A. Pengertian Administrasi Negara/Publik.....	1
B. Definisi Administrasi Negara/Publik Menurut Para Ahli....	2
C. Karakteristik Ilmu Administrasi Negara/Publik.....	4
BAB 2 KONSEP DAN PERKEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK.....	9
Konteks Pergeseran Paradigma Administrasi Negara.....	16
BAB 3 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA.....	18
A. Pengertian Lembaga Negara.....	18
B. Susunan Pemerintahan Pusat	21
C. Susunan Pemerintahan Provinsi dan Kota	27
D. Susunan Pemerintahan Kecamatan dan Desa	31
BAB 4 EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA	33
BAB 5 LEMBAGA PEMERINTAH PUSAT DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI	50
A. Pemerintahan Pusat	51
B. Pemerintahan Daerah.....	59
C. Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah.....	68
BAB 6 KEBIJAKAN PUBLIK	75
A. Konsep Kebijakan Publik	75
BAB 7 LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH	91
A. Pemerintahan Daerah.....	91
B. Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah.....	99

BAB 8 REFORMASI ADMINISTRASI DAN GOOD	
GOVERNANCE.....	107
A. Pendahuluan.....	107
B. Reformasi Administrasi Publik.....	114
C. Good Governance.....	116
D. Prinsip Good Governance.....	117
E. Penerapan Good Governance Di Indonesia.....	121
 BAB 9 ISU-ISU REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK.....	123
A. Sejarah Reformasi Administrasi di Indonesia.....	123
B. Reformasi Administrasi di Era Reformasi.....	136
 BAB 10 REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK PEMERINTAH	141
 BAB 11 REFORMASI ADMINISTRASI BIROKRASI PUBLIK.....	160
A. Reformasi Administrasi Birokrasi Publik.....	160
 BAB 12 REFORMASI ADMINISTRASI DALAM PELAYANAN	
PUBLIK.....	171
A. Konsep Reformasi, Birokrasi, dan Pelayanan Publik.....	171
B. Polemik Reformasi Birokrasi di Indonesia.....	172
C. Reformasi dalam Pelayanan Publik.....	173
 BAB 13 REFORMASI ADMINISTRASI DALAM PEMERINTAH	
DAERAH.....	177
A. Reformasi Administrasi.....	177
B. Reformasi Birokrasi.....	182
DAFTAR PUSTAKA.....	189
TENTANG PENULIS.....	190



ADMINISTRASI
PUBLIK



BAB 1 | ADMINISTRASI PUBLIK

A. Pengertian Administrasi Negara/Publik

Administrasi Publik (Inggris: *Public Administration*) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen: jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik; administrasi pembangunan; pemerintahan daerah; dan good governance. Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah beberapa pengertian tentang administrasi negara yang dikutip dari berbagai sumber: Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-

BAB

2

KONSEP DAN PERKEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI PUBLIK

Teguhnya kedudukan administrasi publik dalam kehidupan masyarakat modern, tak bisa dilepaskan dari faktor kesejarahan. Apa yang dicapai administrasi publik sekarang merupakan hasil dari rangkaian perjalanan sejarah yang panjang. Administrasi publik, sebagai suatu fenomena yang bersifat universal, telah hadir bersama dengan lahirnya peradaban manusia. Rekonstruksi sejarah mengungkapkan bahwa administrasi dapat dilacak kembali ratusan, jika tidak ribuan tahun yang lalu. Kode hukum publik, bentuk organisasi birokratis, sistem akuntansi dan anggaran yang kompleks, administrasi pajak, supervisi pekerjaan umum, sistem prestasi dalam penempatan pegawai pada jabatan-jabatan publik dan sebagainya telah diterapkan sejak zaman lampau. Berdasarkan perjalanan sejarah, pertumbuhan administrasi publik dapat dibagi dalam dua periode berikut:

1. Sejarah pertumbuhan administrasi publik dari zaman kuno sampai dengan tahun 1880,
2. Sejarah pertumbuhan administrasi publik modern, yang berlangsung dari akhir abad kesembilan belas atau awal abad kedua puluh.

Bagian modul ini menguraikan periode pertama, sedang periode kedua akan dibahas pada bagian akhir modul ini. Periode pertama sejarah administrasi publik menerangkan secara singkat administrasi publik yang berlaku pada zaman Mesir Kuno, Cina Kuno, Yunani Kuno, Romawi, Abad Pertengahan, Prusia-Austria, dan Amerika Serikat. Sebagai tambahan, diuraikan beberapa pendekatan yang berlaku dalam studi administrasi publik,

BAB 3

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

A. Pengertian Lembaga Negara

Di dalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, namun maknanya sama. Dalam kepustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi Bahasa Belanda disebut staat organen. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Jika kata pemerintah diganti dengan kata negara, sehingga menjadi lembaga negara, maka hal itu berarti badan-badan negara di lingkungan pemerintahan negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, yudikatif, dan badan-badan negara lainnya. Kamus istilah hukum Fockema Andreae, menerangkan bahwa kata orgaan berarti "alat perlengkapan". Sedangkan alat perlengkapan berarti "orang" atau "majelis" yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan ukum. Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang terendah. Para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat perlengkapan. Tetapi, perkataan ini lebih banyak digunakan untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan

BAB

4

EKOLOGI ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

Membahas filsafat lingkungan tentu tidak dapat dilepaskan dari masalah atau pengertian ekologi. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel, seorang ahli biologi Jerman dalam pertengahan 1860an. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah dan *logos* yang berarti ilmu. Ekologi secara arifiah berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat juga diartikan sebagai ilmu rumah tangga makhluk hidup. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbalbalik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan demikian, ekologi merupakan disiplin baru dari biologi yang merupakan mata rantai isik dan proses biologi serta bentukbentuk yang menjembatani antara ilmu alam dan ilmu sosial. Ekologi juga merupakan cabang ilmu yang mendasari ilmuilmu yang berkembang dan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, erutama dengan lingkungan. Oleh karena itu, ekologi dijadikan sebagai dasar pengetahuan lingkungan.

Lingkungan (lingkungan hidup) merupakan keadaan sekitar ang melingkupi atau mengelilingi suatu organisma hidup atau suatu kehidupan. Riggs (1990) menyatakan erbeda dengan lingkungan yang lainnya. Karenanya, tanpa mengidentifikasi sesuatu yang dilingkup (*environed*), maka lingkungan tidak dapat didefinisikan atau ditetapkan secara tegas. Eterkaitan antara lingkungan dan *environed* diungkapkan dalam konsep ekologi.

Ekologi menurut Riggs (1980) enggambarkan interaksi antara rganisme hidup dengan lingkungannya. Ekologi yang bermula dibidang biologi, berkembang guna menyelidiki ekologi

BAB 5

LEMBAGA PEMERINTAH PUSAT DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI

Pemerintahan Pusat berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sementara Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Mengingat Negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan memiliki daerah yang sangat luas, Pemerintah Pusat mengadakan alat-alat perlengkapan setempat yang disebarkan ke seluruh wilayah Negara yang terdapat di daerah, ini disebabkan Pemerintah Pusat tidak dapat menangani secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah. Namun bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung-jawabnya.

BAB 6 | KEBIJAKAN PUBLIK

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa

BAB 7 | LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH

A. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah menurut pasal 1 huruf d UU nomor 22 tahun 1999 diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Menurut UU nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 1 angka 2, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara kesatuan RI. Berdasarkan UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati , walikota dan perangkat daerah. Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut : "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

1. KEPALA DAERAH

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota yang masing-masing berkedudukan sebagai

BAB 8

REFORMASI ADMINISTRASI DAN GOOD GOVERNANCE

A. Pendahuluan

Istilah reformasi dapat diartikan sebagai perubahan radikal untuk perbaikan (bidang sosial-budaya, politik, dan agama) di suatu masyarakat dan negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990) sedangkan menurut Yahezkel Dror (dalam Soesilo Zauhar, 1996) reformasi administrasi sebagai suatu perubahan yang terencana terhadap aspek utama administrasi atau reformasi administrasi sebagai *The Artificial Inducement of Administrative Transformation Against Resistance*. Pengertian lainnya menurut Irving Swerdlow sebagaimana dikutip oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1992) reformasi administrasi negara adalah perubahan yang terencana terhadap pelaksanaan peran elit penguasa (militer, birokrasi, parpol dan lain-lain) dalam mencapai tujuan negara. Soesilo Zauhar menambahkan bahwa reformasi yang dilakukan di negara berkembang seharusnya bersifat programatik. Reformasi akan dapat berjalan efektif jika didesain dengan mempertimbangkan dan melibatkan lingkungan dimana reformasi itu dilaksanakan. Perubahan yang terjadi dalam birokrasi dan cara kerjanya, merupakan akibat perubahan yang terjadi pada sistem lain. Hahn been dan Smonte dalam Soesilo Zauhar (1996) mengemukakan lima alat pengukur reformasi administrasi negara, yaitu meliputi penekanan baru terhadap program, perubahan sikap dan perilaku masyarakat, perubahan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada komunikasi terbuka dan manajemen partisipatif, penggunaan sumber daya

BAB 9 | ISU-ISU REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

A. Sejarah Reformasi Administrasi di Indonesia

Latar Belakang Pelayanan publik pada masa pemerintahan orde lama tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Sistem birokrasi pemerintahan yang dikembangkan pemerintah orde lama justru sepenuhnya ditunjukkan untuk mendukung semakin berkembangnya pola paternalistik yang telah menjai sistem birokrasi pada era kerajaan. Pemerintah orde lama memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja menghapus sistem ketatanegaraan yang telah

1. Administrasi publik harus konsisten mengupayakan pembentukan kebijakan tetap mengarah pada upaya melayani kepentingan publik.
2. Saat mengimplementasikan kebijakan dan menyampaikan pelayanan, maka aktor administrasi publik harus berkomitmen terhadap efektivitas dan keadilan, akuntabel terhadap kegagalan proses politik serta tanggap terhadap publik.
3. Mengelola sumberdaya dengan berpedoman pada alokasi yang efisien atas sumber daya yang terbatas
4. Administrasi publik harus bertindak independen yang dipedomani atas kepentingan publik.

Keempat hal tersebut dapat dilaksanakan baik dengan memerhatikan:

1. Prosedur yang diimplementasikan harus adil, tanpa membedakan golongan ras, agama, dan lainnya.

BAB 10

REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK PEMERINTAH

A. Sejarah Reformasi Administrasi di Indonesia

Latar Belakang Pelayanan publik pada masa pemerintahan orde lama tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Sistem birokrasi pemerintahan yang dikembangkan pemerintah orde lama justru sepenuhnya ditunjukkan untuk mendukung semakin berkembangnya pola paternalistik yang telah menjiwaisistem birokrasi pada era kerajaan. Pemerintah orde lama memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja menghapus sistem ketatanegaraan yang telah

1. Administrasi publik harus konsisten mengupayakan pembentukan kebijakan tetap mengarah pada upaya melayani kepentingan publik.
2. Saat mengimplementasikan kebijakan dan menyampaikan pelayanan, maka aktor administrasi publik harus berkomitmen terhadap efektivitas dan keadilan, akuntabel terhadap kegagalan proses politik serta tanggap terhadap publik.
3. Mengelola sumberdaya dengan berpedoman pada alokasi yang efisien atas sumber daya yang terbatas
4. Administrasi publik harus bertindak independen yang dipedomani atas kepentingan publik.

Keempat hal tersebut dapat dilaksanakan baik dengan memerhatikan:

1. Prosedur yang diimplementasikan harus adil, tanpa membedakan golongan ras, agama, dan lainnya.
2. Akses pelayanan harus dibuka luas untuk masyarakat.

BAB 11

REFORMASI ADMINISTRASI BIROKRASI PUBLIK

A. Reformasi Administrasi Birokrasi Publik

Pada dasarnya gerakan reformasi administrasi disebabkan birokrasi tidak mampu merespons keinginan masyarakat. Traditional bureaucracy yang merupakan konsepsi birokrasi yang selama ini kita kenal tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat sehingga mereka tidak mampu memenuhi tuntutan publik. Secara terperinci dapat disebutkan 4 faktor yang mempengaruhi reformasi administrasi di negara-negara berkembang, yaitu sebagai berikut.

1. Ketidakpuasan kepada pemerintah, yang bersumber pada terlalu besarnya organisasi pemerintah sehingga cenderung mengkonsumsi seluruh sumber daya yang ada, pemerintah terlalu campur tangan dan melakukan kegiatankegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat sendiri, pemerintah dipandang menggunakan cara-cara usang dalam menerapkan manajemen baru.
2. Munculnya teori-teori ekonomi baru.
3. Globalisasi dan perdagangan bebas.
4. Perkembangan teknologi.

Umumnya negara-negara berkembang mempunyai ciri-ciri pola dasar sistem administrasinya merupakan tiruan atau jiplakan dari sistem kolonial, kekurangan sumber daya yang berkualitas, cenderung mengutamakan atau berorientasi pada kepentingan pribadi maupun kelompok, formalisasi birokrasi, cenderung bersifat otonom, sangat lamban dan birokratis, dan adanya unsur-unsur non birokrasi dalam pengambilan

BAB 12

REFORMASI ADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK

A. Konsep Reformasi, Birokrasi, dan Pelayanan Publik

Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Kemudian, menurut Sedarmayanti (2009: 67) bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa reformasi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berdampak pada kehidupan bernegara, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan *good governance*, maka perlu ada reformasi dalam birokrasi sebab menyangkut penyelenggaraan negara untuk mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik.

Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi tersebut dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Dengan kata lain, birokrasi sangat berkaitan erat dengan sistem dalam suatu organisasi atau lembaga dan memiliki tujuan tertentu.

Apabila digabungkan antara kata reformasi dengan birokrasi, secara definisi reformasi birokrasi menurut Menpan adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan

BAB 13

REFORMASI ADMINISTRASI DALAM PEMERINTAH DAERAH

A. Reformasi Administrasi

Reformasi administrasi merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek kelembagaan), serta sikap dan perilaku birokrat guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sehingga tercipta administrasi publik yang sehat. Reformasi administrasi dirumuskan dan diselenggarakan oleh pemerintah untuk membentuk jajaran aparatur publik yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan semakin baik. Mengacu pada pemahaman ini reformasi administrasi dapat difahami sebagai upaya yang dilakukan secara sadar untuk menerapkan gagasan-gagasan baru atau yang diperbarui mengenai sistem administrasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pertanyaan yang timbul yaitu apakah bentuk Tindakan konkret mengenai reformasi administrasi yang dapat diaplikasikan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, baik menyangkut pembangunan sosial, ekonomi maupun pembangunan bangsa (*nation building*)? Sehubungan dengan hal tersebut, onteks reformasi administrasi mencakup:

1. menekankan pada program-program baru;
2. berkaitan dengan sikap dan perilaku klien dan birokrat;
3. menyangkut tindakan *internal administrative* melalui komunikasi dan manajemen partisipasi;
4. menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya;
5. mengurangi berperannya pekerjaan rutin yang terlalu berorientasi pada pendekatan legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Henry, Nicholas. 2013. *Public Administration and Public Affairs*.
- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.
- Frederickson, H.G, Smith K.B. 2012. *The Public Administration Theory Primer*. Westview Press.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service Revisited*. *Public Administration Review*, 75(5), 664-672. doi:10.1111/puar.12347
- Pasolong, 2013 *Teori Administrasi Publik*
- Thoha, Miftah, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta:Kencana
- Gaffar, Afan, dkk. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, PustakaPelajar, Yogyakarta
- Pamudji, S. 2004. *Ekologi Administrasi Negara*. BumiAksara
- Syafii, Inu Kencana, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta:Rineka Cipta

TENTANG PENULIS

DOLI TUA MULIA RAJA PANJAITAN, S.AP, M.IP



Doli Tua Mulia Raja Panjaitan, S.AP, M.IP lahir di Kisaran pada tanggal 8 Februari 1988. Aktif sebagai Dosen Tetap Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darma Agung. Penulis menyelesaikan Pendidikan S-1 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung pada tahun 2010, menyelesaikan Pendidikan S-2 Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Darma Agung (UDA) Medan pada tahun 2017. Mengampu Mata Kuliah Administrasi Publik, Manajemen Admintrasi Publik, Teori-Teori Demokrasi dan Teori Birokrasi. Penulis aktif dalam mengajar dan menulis artikel di beberapa Jurnal Ilmiah seperti *Kohesi Science* (2018), *Darma Agung* (2019), *Governance Opinion* (2019), *Prointegrita* (2020), *Talenta* (2020).

PIKI DARMA KRISTIAN PARDEDE, S.Sos. M.Si



Piki Darma Kristian Pardede lahir di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada 16 Desember 1994. Gelar kesarjanaannya (S1) diperoleh dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada tahun 2017, kemudian meraih gelar Magister (S2) Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2019. Aktif sebagai Dosen dan Peneliti dibidang kajian Ilmu Pemerintahan dan Adiministrasi Publik hingga menerbitkan beberapa jurnal nasional dan internasional. Selain itu merupakan pendiri dari *Centre for Public Policy and Local Governance Studies* (PUBLIGO Centre), dan Ia fokus pada isu-isu Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan, Pengarusutamaan Gender, Politik, Lingkungan, dan HAM. Penulis juga aktif menjadi peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Kebijakan (ELSAKA) Sumut.